

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN
TRANSAKSI MENCURIGAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PP
NOMOR 43 TAHUN 2015 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI) =
Legal Consequences For Notary Who Did Not Report Suspicious
Transaction As Implementation of Government Regulation No. 43 Year
2015 (Study on the Jakarta High Court Verdict Number: 7/PID. SUS-
TPK/2017/PT.DKI)

Desri Wijayanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20502157&lokasi=lokal>

Abstrak

<p>Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi keuangan yang mencurigakan saat bekerja dengan kliennya. Identifikasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah regulasi yang mengatur kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dan peranannya saat menjadi saksi perkara korupsi dan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan selanjutnya data-data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk profesi Notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Kelalaian melaksanakan kewajiban pelaporan akan diberikan sanksi administrasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan yang berlaku Melaksanakan kewajiban pelaporan berarti menjaga reputasi sebagai profesi yang kredibel, dapat dipercaya serta merupakan cara memperluas jaringan dan pengembangan bisnis.</p><hr /><p>Corruption is one of the main reason law offenders commit money laundering. While performing money-laundering process, it is common for corruptor to find assistance from other parties to carry out financial transactions in such a way that the transactions will not appear suspicious. Notary is included as a profession appointed as reporting parties and required to submit reports if finding suspicious financial transactions while working with their client. Problems identification to be analyse on this case study are government regulations that regulate Notary obligation as reporting parties and their role while acting as witness on corruption and money laundering case. Research method in this writing is normative legal research with analytical descriptions. The type of data use is secondary data using document studies and further data collected and analysed using qualitative approaches. The Ministry of Law and Human Rights is the Supervisory and Regulatory Institution that administer Notary reporting obligations. Failure to comply with reporting obligations will impose administrative sanctions by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations. Performing obligatory reports means maintaining reputation as a credible, trustworthy profession, this is one of method to expand networks and develop business.</p>